

**TINDAKAN CV AJN SEBAGAI EKS PEMEGANG IUP YANG TIDAK  
MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCATAMBANG DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**Muhammad Rifqy**

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

**ABSTRAK**

Kegiatan pertambangan batubara kian marak di Indonesia diharapkan dengan berlangsungnya kegiatan pertambangan batubara dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Namun dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan pertambangan batubara dalam menjalankan kegiatan pertambangannya tidak mengindahkan atau abai akan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar. Bahkan tak jarang pula terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang ada oleh perusahaan pertambangan batubara demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya (*anomie of success*). Salah satu perusahaan pertambangan batubara yang menunjukkan adanya praktik kejahatan korporasi di bidang pertambangan adalah CV. AJN sebagai eks pemegang IUP yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang terhadap bekas lubang tambangnya, dimana lubang tambang tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja. Alhasil keberlangsungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat jadi tumbalnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum guna menemukan pemecahan masalah hukum dengan cara menemukan aturan hukum maupun doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan masalah, antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan CV. AJN sebagai eks Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Pasal 161B ayat (1) huruf a Undang-Undang Minerba.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Pertambangan, Reklamasi, Pascatambang, Kejahatan Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

***ACTION OF CV AJN AS AN EX-IUP HOLDER WHO DOES NOT  
IMPLEMENT POST-MINING RECLAMATION REVIEWED FROM LAW  
NUMBER 3 OF 2020 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING***

**Muhammad Rifqy**

Faculty of Law

Advisors:

1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.
2. Erly Aristo, S.H., M.Kn.

***ABSTRACT***

*Coal mining activities are increasingly widespread in Indonesia, it is hoped that the on going coal mining activities can have a positive impact on the community, nation and state. But in reality it cannot be denied that there are still many coal mining companies in carrying out their mining activities that do not heed or ignore the interests of the community and the surrounding environment. In fact, it is not uncommon for coal mining companies to violate existing norms in order to obtain as much profit as possible (anomie of success). One of the coal mining companies that shows the existence of corporate criminal practices in the mining sector is CV. AJN as a former IUP holder who does not carry out reclamation and post-mining of its former mining pits, where the mining pits are left abandoned just like that. As a result, environmental sustainability and public safety are at stake. The research method used in writing this thesis is a normative juridical research method, namely legal research in order to find solutions to legal problems by finding legal rules and legal doctrines that are relevant to the subject matter. This research uses 2 (two) approaches to the problem, including the statute approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that the action of CV. AJN as a former IUP holder who does not carry out reclamation and post-mining activities may be subject to corporate criminal liability based on Article 161B paragraph (1) letter a of the Minerba Law.*

***Keywords: Mining Crime, Reclamation, Post-mining, Corporate Crime, Corporate Criminal Liability***